

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Penanganan Krisis Sampah Di Kota Padang Berdasarkan hasil temuan yang peneliti temukan maka, dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Penanganan Krisis Sampah Di Kota Padang sudah terimplementasikan, namun belum optimal, dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses implementasinya. Pertama, masih adanya kendala dalam hal sumber daya manusia dan non manusia, dari segi sumberdaya manusia jumlah dari tenaga teknis ataupun tenaga harian lepas. Lalu dari segi dimensi sumberdaya non-manusia masih terkendala dari sarana prasarana dalam melakukan implementasi, seperti mobil pengangkut, bak tempat sampah, dan jumlah TPS (tempat pembuangan sementara) yang belum mencukupi.

Kedua, kendala selanjutnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kesadaran dari masyarakat masih kurang baik dalam hal kesadaran lingkungan, masih banyak masyarakat yang masih belum membuang sampah pada tempatnya. Lalu masyarakat juga masih belum melakukan pemilahan dalam pembuangan sampah yang ada padahal pemilahan sampah sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 pasal 21 tentang pemilahan dan diperkuat dengan Peraturan Walikota No.109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

Kendala-kendala tersebut yang menjadikan hambatan bagi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Penanganan Krisis Sampah Di Kota Padang ini untuk dapat optimal. Setelah peneliti melihat dengan seksama dan mengalisis dengan baik, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran atau rekomendasi. Rekomendasi atau saran ini kiranya dimaksudkan agar program ini dapat terimplementasikan dengan baik, yakni sebagai berikut :

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil peneliatian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai saran kepada Pemerintah dan Masyarakat Kota Padang, diantaranya:

1. Perlu adanya tambahan ataupun support yang lebih lagi dalam hal sumberdaya manusia, khususnya THL (tenaga harian lepas) atau tim pengangkut sampah.
2. Perlu adanya penyediaan sarana prasarana yang lebih mumpuni lagi, mulai dari kendaraan pengangkut hingga TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada.
3. Perlu adanya pendidikan khusus ataupun sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kesadaran lingkungan, yakni membuang sampah pada tempatnya serta melakukan seleksi ataupun pengelompokan sampah sampah sesuai jenisnya.

